

## Estetika yang Berpihak: Seni Partisipatif sebagai Tanggapan atas Elitisme Seni Rupa

**Deborah Ram Mozes**  
deborahrammozes@gmail.com  
Perupa, Institut Teknologi Bandung

### Abstrak

Di dunia seni rupa Indonesia, galeri yang berkilau bukanlah tempat suci bagi dunia penciptaan, melainkan panggung berupa topeng yang berkuasa. Kolusi dan nepotisme, bukan bakat, menjaga gerbang yang menjadikan seni hak istimewa kaum terhubung. Lomba seni yang naif dianggap tolok ukur kejeniusan, sekaligus mencemooh esensi penciptaan yang tidak terukur. Namun demikian, di gang-gang urban, seni partisipatif, seperti mural, instalasi kolektif bangkit sebagai bentuk pembangkangan, terasa lebih jujur daripada sorot lampu ruang institusional. Penelitian ini menggali bagaimana seni partisipatif melawan cengkeraman estetika elitis. Lewat studi kasus seni jalanan Jakarta, analisis wacana praktik kuratorial, dan refleksi lokakarya komunitas, penelitian ini berusaha membedah ketimpangan ekosistem seni yang terjadi. Kebaruannya terletak pada penelusuran akar seni partisipatif dalam resistensi historis terhadap struktur budaya feodal. Temuan mengungkap bagaimana jaringan patronase membungkam suara baru, sementara praktik partisipatif membentuk makna kolektif, lepas dari tirani kuratorial. Penelitian menyimpulkan bahwa masa depan seni bukan di galeri, melainkan di ruang bersama tempat penciptaan terjadi guna menjawab kebutuhan rakyat, bukan kekuasaan. Makalah ini membawa pertanyaan: untuk siapa seni bernapas ketika jiwanya diperdagangkan di pasar koneksi?

**Kata kunci:** Seni partisipatif, kolusi, nepotisme, estetika urban, resistensi

### Abstract

*In Indonesia's art world, where galleries gleam with promise, visual art is less a sanctuary of creation than a stage for power's masquerade. Collusion and nepotism, not talent, guard the gates, rendering art a privilege of the connected. Competitions, naively deemed measures of genius, mock the ineffable act of creation. Yet, in urban alleys, participatory art—murals, collective installations—rises as defiance, truer than the sterile spotlight of institutional halls. This study probes how such art resists the chokehold of elite aesthetics. Through case studies of Jakarta's street art, discourse analysis of curatorial practices, and reflections on community workshops, it dissects the art ecosystem's inequities. Its novelty lies in tracing participatory art's roots to historical resistance against feudal cultural structures. Findings expose how networks of patronage stifle new voices, while participatory practices forge communal meaning, unshackled by curatorial tyranny. The study concludes that art's future lies not in galleries but in shared spaces where creation answers to the people, not power. This seminar questions: for whom does art breathe?*

**Keywords:** Participatory art, collusion, nepotism, urban aesthetics, resistance

## Pendahuluan

*“Di negeri yang tiap senyum kurator bisa jadi pintu pameran, sementara pelukis dari pelosok hanya bisa melukis di dinding rumah tetangga, kita bicara demokrasi seni dengan logat feodalisme.”*

Dunia seni rupa Indonesia telah lama dibayangi oleh praktik kolusi dan nepotisme yang telah lama berakar. Di balik kanvas-kanvas yang meriah dan ruang-ruang pameran berlampu terang, ada jejaring kekerabatan dan kedekatan sosial-politik yang memainkan peranan penting yang menentukan siapa yang mendapatkan panggung, siapa yang terpilih, dan siapa yang dilupakan. Sistem yang semestinya menjadi arena dialog terbuka, justru beroperasi sebagai klub eksklusif, tertutup bagi mereka yang tidak memiliki “kunci” berupa koneksi, garis darah, atau kedekatan dengan elite kuratorial. Praktik ini tidak ubahnya penyakit laten yang menggerogoti kredibilitas seni rupa sebagai bentuk ekspresi bebas dan orisinal. Lomba seni, beasiswa, dan pameran sering kali tidak dinilai dari kualitas karya, melainkan dari silsilah kreator. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seni bisa menjadi cermin masyarakat, jika cermin itu sendiri keruh oleh kabut koneksi dan ego institusional?

Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan akses yang signifikan. Banyak seniman muda dari daerah, kelas bawah, atau komunitas marginal tidak mendapatkan peluang yang sama untuk menampilkan karya-karya mereka. Hal ini terjadi bukan karena kurangnya ide atau potensi, tetapi karena terhalang oleh sistem yang mengistimewakan “yang sudah dikenal.” Dalam lanskap semacam ini, seni tidak lagi inklusif. Ia menjelma menjadi simbol kekuasaan kultural dan hanya bisa disentuh oleh mereka yang berada dalam lingkaran dominan. Artinya, persoalan dalam seni rupa bukan hanya soal estetika, melainkan juga soal struktural dan sosial. Akibatnya, seni rupa terjebak dalam situasi siapa yang diberi suara dan siapa yang dibungkam.

Seperti dunia mode atau diplomasi, seni rupa dalam konteks Indonesia sering kali tidak hadir sebagai wahana keterbukaan atau ruang kontestasi gagasan, melainkan sebagai benteng eksklusivitas. Seni rupa muncul sebagai privilese atau keistimewaan yang diwariskan, bukan diperjuangkan. Bukan hal yang mengejutkan apabila ruang-ruang galeri utama cenderung diisi oleh wajah-wajah yang sama, narasi-narasi seragam, dan estetika yang tidak banyak mengguncang *status quo*. Lebih dari itu, nilai-nilai artistik menjadi tereduksi oleh nilai finansial dan simbolik dari institusi yang mendukungnya karena nilai seni tidak diukur berdasarkan terobosan, keresahan, atau relevansi sosialnya, melainkan dari siapa yang mempresentasikannya, di mana ia dipajang, dan siapa yang mengurasi.

Dalam atmosfer stagnan yang menyesakkan dada ini, seni rupa partisipatif muncul sebagai bentuk perlawanan yang subtil namun signifikan. Praktik seni yang melibatkan komunitas secara aktif, baik dalam proses maupun presentasi, menjadi titik terang dalam membuka kembali makna seni sebagai alat transformasi sosial. Seni partisipatif menawarkan alternatif: ruang-ruang kolektif, kolaborasi lintas identitas, dan bentuk-bentuk kerja artistik yang tidak menekankan hierarki. Di tengah kegagapan dunia seni konvensional dalam merespons dinamika zaman, praktik ini menandai fase penting dalam redefinisi ekosistem seni Indonesia: dari sistem representasi menuju sistem partisipasi. Dengan pendekatan semacam ini, seniman tidak lagi berdiri di atas podium, melainkan duduk

bersama warga. Galeri tidak lagi menjadi altar suci yang steril, tetapi menjelma menjadi ruang terbuka: hidup, cair, dan penuh perdebatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini mencoba merumuskan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Pertama, mengapa sistem nepotisme dan kolusi masih sangat dominan dalam praktik seni rupa Indonesia? Kedua, bagaimana ketimpangan akses ini menjadi penghambat bagi perkembangan potensi seniman-seniman muda dan marginal? Ketiga, bagaimana praktik seni partisipatif dapat menjawab kegagalan struktur seni konvensional? Keempat, bagaimana seni partisipatif menciptakan ruang sosial dan ekonomi baru di luar sistem seni arus utama? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan penting dalam upaya mengungkap sisi gelap dunia seni yang kerap ditutupi oleh lapisan estetika dan narasi kemajuan. Lebih dari sekadar refleksi, tulisan ini diharapkan menjadi provokasi intelektual dalam mendorong munculnya kesadaran kolektif tentang perlunya desentralisasi kekuasaan dan inklusivitas dalam praktik seni rupa kontemporer di Indonesia.

### **Eksklusivitas dan Privilese dalam Seni Rupa Indonesia**

Bagian ini akan diuraikan konsep-konsep kunci dan menyajikan sintesis dari literatur yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk menempatkan penelitian dalam konteks akademis yang lebih luas, mengidentifikasi celah dalam pengetahuan yang ada, dan mendukung argumen yang akan disajikan dalam bagian-bagian selanjutnya.

### **Seni sebagai Lahan Oligarki**

Seni rupa Indonesia, alih-alih menjadi lahan ekspresi bebas, telah lama terkooptasi hanya sebagai lahan oligarki budaya. Praktik-praktik seni tidak lepas dari kuasa elite budaya yang menentukan siapa yang layak tampil dan siapa yang harus menepi. Galeri, kolektor, dan lembaga seni besar kerap membentuk kartel simbolik yang mengatur sirkulasi karya dan seniman. Mekanisme ini melanggengkan *status quo* dan meminggirkan inovasi yang datang dari pinggiran.

### **Kolusi, Nepotisme, dan Jalur Kekkerabatan**

Kolusi, nepotisme, dan jalur kekerabatan dapat membatasi akses seniman independen dan meminggirkan suara-suara baru. Sebagaimana diungkapkan oleh Haryanto (2022:56), gejala ini menjadikan seni hak istimewa kaum terhubung. Kolusi dan nepotisme dan bukan bakat menjaga gerbang dunia seni rupa Indonesia sehingga menciptakan hambatan bagi seniman yang tidak memiliki koneksi sosial atau patronase yang kuat. Akibatnya, kurangnya keberagaman dan inovasi dalam seni rupa. Fenomena ini juga sering melibatkan patron-patron yang memprioritaskan koneksi di atas kualitas karya, sebagaimana dicatat oleh Setiawan (2023:128).

### **Estetika Elitis dan Struktur Feodal dalam Seni**

Estetika elitis yang mengacu pada pandangan seni yang hanya diakui dan dihargai oleh lingkaran terbatas atau institusi tertentu seringkali mengabaikan bentuk-bentuk ekspresi lain atau seniman dari latar belakang yang berbeda. Sebagaimana dicatat oleh Yuliman (2001:45), seni Indonesia sejak era kolonial telah terikat pada sistem patronase.

Pola patronase ini telah bertransformasi, tetapi tetap memengaruhi praktik seni modern, menciptakan hierarki, dan telah pula menciptakan eksklusivitas. Manifestasi struktur demikian yang tercermin dalam praktik kuratorial dan pameran menunjukkan bahwa sistem ini membungkam suara baru.

### **Seni sebagai Bentuk Resistensi Budaya**

Seni telah lama digunakan sebagai medium untuk menantang kekuasaan, norma-norma dominan, dan ketidakadilan sosial. Seni partisipatif, khususnya yang memiliki potensi sebagai bentuk pembangkangan terhadap struktur yang opresif, dapat memicu kesadaran kolektif, membangun solidaritas, dan menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang terpingkirkan. Seni yang menentang kekuasaan atau norma dominan ini, misalnya mural, instalasi kolektif, bangkit sebagai pembangkang karena lebih jujur daripada sorot lampu ruang institusional.

### **Praktik Kuratorial dan Pemberdayaan Komunitas**

Praktik kuratorial dalam dunia seni, termasuk peran, etika, dan tantangan yang dihadapi kurator, dalam praktiknya seringkali membatasi akses seniman dan mendominasi narasi seni. Fenomena ini dikritik oleh Supriatna dan Widodo (2022:79). Praktik kuratorial dapat mendorong (atau sebaliknya) menghambat partisipasi publik dan representasi yang beragam. Fenomena ini tercermin melalui galeri dan pameran, yang seharusnya jadi wadah ekspresi, tetapi arena kolusi antara kurator dan patron dalam mengatur akses berdasarkan koneksi. Seharusnya, kurator dapat memfasilitasi pemberdayaan komunitas melalui proyek-proyek seni partisipatif dengan fokus pada praktik yang transparan, inklusif, dan mendukung otonomi seniman dan komunitas. Praktik partisipatif ini membentuk makna kolektif, lepas dari tirani kuratorial. Untuk mewujudkan seni yang egaliter, diperlukan praktik kuratorial yang transparan dan platform berbasis meritokrasi kreatif.

## **Kritik Terhadap Sistem Kurasi dan "Kompetisi Seni**

### **Absurditas Pengukuran Kejujuran Estetik**

Esensi seni adalah ekspresi yang menolak pengukuran baku. Namun kompetisi seni di Indonesia justru ada upaya memenjarakan kejujuran estetik dalam parameter yang kaku dan sering kali bias. Yuliman (2001:45) menyebut kompetisi seni sebagai pengkhianatan terhadap jiwa cipta, sebuah absurditas yang mereduksi karya menjadi komoditas yang dapat diperingkat. Wawancara dengan 15 seniman jalanan di Jakarta dan Bandung (2022) mengungkap bahwa 10 di antaranya memandang kompetisi seni sebagai "pertunjukan formalitas" yang lebih mencerminkan selera juri daripada nilai karya. Seorang seniman dari Jakarta menyatakan bahwa lomba seni itu seperti lotre: karya terbaik tidak selalu menang, tetapi yang tahu 'aturan main' pasti unggul."

Analisis wacana terhadap pengumuman kompetisi seni nasional (2022—2024) menunjukkan penggunaan frasa seperti “keunggulan estetik” dan “inovasi kreatif” yang samar. Hal ini memungkinkan munculnya sikap manipulatif atas hasil berdasarkan agenda juri (Supriatna dan Widodo, 2022:82). Bourdieu (1993:47) menegaskan bahwa kompetisi seni sering menjadi alat legitimasi kuasa budaya, tempat institusi menentukan apa yang “layak” sebagai seni. Kasus kompetisi mural di Jakarta (2023) memperlihatkan bagaimana pemenang yang ternyata memiliki koneksi dengan sponsor menghasilkan karya yang selaras dengan tema korporasi, bukan narasi komunitas (Setiawan, 2023:130). Absurditas ini tidak hanya merendahkan kejujuran estetik, tetapi juga memperkuat hierarki yang menyingkirkan seniman independen, menjadikan kompetisi bukan medan cipta, melainkan arena politik

### **Ketimpangan Akses dan Representasi**

Ketimpangan akses dan representasi dalam seni rupa Indonesia adalah cermin dari ekosistem yang elitis dan eksklusif. Data sekunder dari katalog pameran Jakarta (2022—2024) menunjukkan hanya 15% seniman independen yang berhasil masuk galeri ternama, dengan mayoritas berasal dari lingkaran akademik atau memiliki koneksi dengan kurator (Kusumawati dan Prabowo, 2023:210). Wawancara dengan 20 anggota komunitas seni urban melahirkan kesimpulan bahwa galeri adalah “klub eksklusif” yang tidak mewakili narasi warga kota, terutama dari kelompok marjinal, seperti komunitas pinggiran atau seniman otodidak.

Ketimpangan ini diperparah oleh dominasi seniman elit dalam pameran formal. Analisis tematik dari wawancara seniman menunjukkan bahwa 12 dari 15 responden merasa terkucil karena kurangnya jaringan sosial atau dana untuk “membeli” akses, seperti biaya pendaftaran pameran atau sponsor (Haryanto, 2022:62). Kasus pameran seni kontemporer di Jakarta (2022) menunjukkan bagaimana seniman dengan dukungan korporasi mendominasi ruang, sementara karya komunitas lokal hanya mendapat sudut kecil, jika tidak sepenuhnya diabaikan (Purnomo & Sari, 2024:42). Bourdieu (1993:50) menyebut fenomena ini sebagai “kapital budaya.” Di sini akses ke seni ditentukan oleh sumber daya sosial dan ekonomi, bukan bakat. Ketimpangan representasi ini tidak hanya membungkam suara baru, tetapi juga memiskinkan wacana seni, menjadikan galeri cermin privilese, bukan cerminan realitas sosial.

### **Partisipasi Publik dan Perlawanan terhadap Ekosistem Seni Konvensional**

Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama yang diperoleh dari pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur, studi kasus etnografi visual, analisis wacana kuratorial, dan refleksi lokakarya komunitas. Hasilnya untuk menjawab perihal fenomena kolusi dan nepotisme dalam ekosistem seni rupa urban Indonesia serta potensi seni partisipatif sebagai ruang cipta yang egaliter.

### **Munculnya Praktik Seni Rupa Partisipatif**

Seni rupa partisipatif di Indonesia muncul sebagai respons terhadap ekosistem seni konvensional yang elitis dan eksklusif. Kategori seni ini menawarkan ruang bagi warga untuk merebut narasi estetika dari cengkeraman galeri. Berbeda dengan seni institusional yang terkungkung kurasi ketat, seni partisipatif, seperti mural, instalasi komunal, dan lokakarya, berakar pada kolaborasi kolektif dengan menolak hierarki kuasa (Kusumawati dan Prabowo, 2023:204). Yuliman (2001:32) menegaskan bahwa seni sejati adalah cerminan realitas sosial, dan seni partisipatif untuk mewujudkan visi ini dengan menempatkan warga sebagai pencipta, bukan penonton pasif.

Wawancara dengan 15 seniman jalanan di Jakarta dan Bandung (2024) mengungkap bahwa 13 responden memandang seni partisipatif sebagai “pembebasan” dari dogma galeri. Seorang seniman dari Bandung menyatakan, “Kami tidak butuh kurator untuk bilang karya kami berharga; warga yang hidup dengan mural kami yang menentukan maknanya.” Data sekunder dari katalog seni urban (2019–2024) menunjukkan adanya peningkatan proyek partisipatif, seperti mural komunitas di Jakarta yang melonjak 40% sejak 2020 (Dewi dan Santosa, 2021:92). Munculnya praktik ini bukan sekadar tren estetika, melainkan perlawanan ideologis terhadap sistem yang meminggirkan suara rakyat, menggemakan tradisi budaya rakyat yang menentang elit (Anderson, 1990:23).

### **Kolaborasi Komunitas dan Intervensi Ruang Kota**

Kolaborasi komunitas dalam seni partisipatif mengubah ruang kota menjadi kanvas kolektif sehingga menantang dominasi galeri sebagai pusat estetika. Etnografi visual di Kampung Tongkol Jakarta (2024—2025) mendokumentasikan proses penciptaan mural bertema banjir (dinding sudah dirubuhkan), alam, dan lain-lain, di mana warga, bukan seniman profesional, menentukan komposisi dan simbol visual (Gambar 1). Wawancara dengan 20 anggota komunitas mengungkap bahwa proses ini memperkuat rasa kepemilikan terhadap ruang publik, dengan 18 responden menyatakan mural “menceritakan hidup kami, bukan fantasi kurator” (Rahmawati, 2021:78).



Gambar 1. Mural Komunitas di Kampung Tongkol, Jakarta.  
Pengkinian data dokumentasi, diarenakan sebagian dinding sudah mengalami perubahan dan diruntuhkan.



Gambar 2. Mural Komunitas di Kampung Tongkol, Jakarta.  
Pengkinian data dokumentasi, diarenakan sebagian dinding sudah mengalami perubahan dan diruntuhkan.  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025



Gambar 3. Mural Komunitas di Kampung Tongkol, Jakarta.  
Pengkianian data dokumentasi, diarenakan sebagian dinding sudah mengalami perubahan dan diruntuhkan.  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Di Bandung, Kolektif Jalanan menggelar lokakarya terbuka (2024) yang menghasilkan instalasi tentang penggusuran yang dipajang di ruang publik, sehingga mengintervensi narasi resmi kota yang sering mengabaikan warga miskin. Analisis tematik dari wawancara seniman menunjukkan bahwa kolaborasi ini tidak hanya estetik, tetapi juga politis. Akibatnya, tercipta “ruang perlawanan” yang menolak komodifikasi seni (Susanti, 2020:118). Intervensi ruang kota ini sebagaimana dianalisis Kusumawati dan Prabowo (2023:212) mengembalikan seni pada fungsi sosialnya, yakni menyuarakan yang tak bersuara dan menjadikan jalanan panggung yang lebih merdeka daripada galeri.

### **Seni sebagai Medium Solidaritas dan Transformasi Sosial**

Di tengah dominasi ekosistem seni formal yang elitis, seni partisipatif muncul sebagai bentuk resistensi dan ruang cipta alternatif yang menjanjikan egaliterisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik seni partisipatif mampu menciptakan makna kolektif dan membebaskan proses kreatif dari campur tangan kuratorial yang dominan. Mural di Kampung Tongkol di Jakarta menjadi contoh nyata potensi seni partisipatif. Mural yang diselesaikan pada tahun 2024 ini merupakan hasil kolaborasi aktif antara seniman jalanan dan warga setempat, tanpa intervensi langsung dari kurator galeri formal.

Mural di Kampung Tongkol itu menunjukkan bahwa seni partisipatif berfungsi sebagai medium solidaritas dan transformasi sosial serta menghubungkan individu dengan isu kolektif. Mural Kampung Tongkol tidak hanya menggambarkan banjir, tetapi juga memicu diskusi komunitas tentang ketahanan lingkungan sekaligus memperkuat ikatan sosial (Dewi dan Santosa, 2021:95). Wawancara dengan anggota komunitas menunjukkan bahwa 16 dari 20 responden merasa lebih terhubung dengan tetangga setelah terlibat dalam proyek seni. Hal ini mencerminkan solidaritas yang lahir dari cipta bersama.

Di Yogyakarta, kelompok Taring Padi melalui lokakarya seni rakyat (2024) menghasilkan poster yang mengkritik ketimpangan agraria. Poster-poster itu didistribusikan secara gratis untuk memobilisasi warga. Tindakan ini selaras dengan pandangan Anderson (1990:25) yang menyatakan bahwa budaya rakyat adalah alat transformasi sosial untuk menentang struktur kekuasaan. Analisis sekunder dari arsip media (Yusuf, 2022) menunjukkan bahwa proyek partisipatif seperti ini meningkatkan kesadaran publik tentang isu sosial hingga 30% di komunitas terlibat. Seni partisipatif dengan demikian bukan sekadar karya visual, melainkan katalis perubahan, menggeser paradigma seni dari estetika elit ke etika kolektif.

Etnografi visual dari proses penciptaan mural ini (direkam melalui foto) menunjukkan adanya interaksi egaliter yang kuat. Tidak ada satu pun individu yang mendominasi proses kreatif; ide-ide datang dari berbagai pihak, dari anak-anak hingga orang dewasa, dan diwujudkan secara bersama-sama. Kontras ini mencolok dengan hierarki yang sering ditemukan di ruang pameran galeri formal, tempat seniman dan kurator cenderung berada di posisi otoritas yang lebih tinggi.

### **Tantangan dan Hambatan dalam Mengembangkan Seni Partisipatif**

Meskipun menjanjikan, pengembangan seni partisipatif juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah soal pendanaan. Proyek seni partisipatif seringkali bergantung pada pendanaan swadaya atau hibah terbatas yang membuatnya sulit untuk berkelanjutan dalam jangka panjang. Seniman jalanan juga sering menghadapi masalah legalitas dan perizinan dalam penggunaan ruang publik.

Selain itu, terdapat tantangan dalam mempertahankan otonomi artistik dari pengaruh patronase modern. Meskipun seni partisipatif berusaha menghindari galeri formal, beberapa proyek masih terjebak dalam kepentingan pihak sponsor yang mungkin memiliki agenda tersembunyi. Setiawan (2023:135) dalam studinya menggarisbawahi bagaimana komodifikasi dapat merusak esensi seni partisipatif. Hal ini menyebabkan proyek-proyek tersebut kehilangan karakter otentik dan partisipasinya menjadi semu. Terakhir, penerimaan masyarakat yang beragam terhadap seni di ruang publik juga menjadi tantangan: sebagian kelompok mungkin belum sepenuhnya memahami nilai dan tujuan dari seni partisipatif.

### **Pertarungan Gagasan: Antara Kesenian Elitis dan Akar Rumput Perlawanan Estetik dan Strategi Visual**

Seni partisipatif menggunakan strategi visual untuk melawan estetika elitis yang steril dan terputus dari realitas sosial. Mural Kampung Tongkol memadukan simbol banjir berupa air keruh dan perahu darurat dengan warna cerah yang menyiratkan harapan. Cara ini menciptakan narasi yang otentik bagi warga (Kusumawati dan Prabowo, 2023:212). Analisis semiotik terhadap mural ini menunjukkan penolakan terhadap estetika galeri yang sering mengagungkan abstraksi tanpa konteks sosial. Yuliman (2001:32) menegaskan bahwa seni sejati harus “berbicara dengan zaman,” dan seni partisipatif mewujudkan ini dengan visual yang berakar pada pengalaman lived experience.

Wawancara dengan 10 seniman jalanan mengungkapkan bahwa 8 responden sengaja menggunakan simbol lokal, seperti like becak, warung, atau grafiti slang, untuk menentang estetika global yang didominasi galeri. Perlawanan estetik ini bukan sekadar gaya, melainkan manifesto visual yang menegaskan seni sebagai milik rakyat, bukan privilese.



Gambar 4. Mural Komunitas di Kampung Tongkol, Jakarta.

Pengkinian data dokumentasi, diarenakan sebagian dinding sudah mengalami perubahan dan diruntuhkan  
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

### **Representasi Marjinal dan Peluang Ekonomi Baru**

Seni partisipatif memberi ruang bagi kelompok marjinal (warga pinggiran, seniman otodidak, komunitas adat) yang tersingkir dari galeri. Di Jakarta, mural komunitas di Kampung Tongkol (2024--2025) menyuarakan narasi warga miskin urban yang absen dari pameran formal (Dewi dan Santosa, 2021:94). Wawancara dengan 20 anggota komunitas menunjukkan bahwa 15 responden merasa “diakui” melalui karya kolektif, meningkatkan harga diri sosial mereka.

Selain representasi, seni partisipatif membuka peluang ekonomi. Suvenir seni berupa lukisan di jalan Braga, Kota Bandung, dipamerkan di sepanjang Jalan Braga Bandung. Tindakan ini memungkinkan komunitas menjual karya kolektif, sehingga menghasilkan pendapatan bagi para pelukis di sana. Di Yogyakarta, Taring Padi mendistribusikan poster seni gratis, tetapi menerima donasi yang mendanai proyek komunitas. Fenomena ini mencerminkan model ekonomi alternatif yang mengurangi ketergantungan pada patron korporasi, sebagaimana dianalisis Rahmawati (2021:82). Representasi marjinal dan peluang ekonomi ini menjadikan seni partisipatif sebagai alat emansipasi, menantang dominasi ekonomi seni elit.

### **Studi Kasus: Ruang Alternatif dan Gerakan Kultural**

Kolektif Jalanan di Bandung menawarkan studi kasus kuat tentang ruang alternatif dan gerakan kultural. Melalui festival jalanan Festival Seni Jalanan “Warna untuk Bumi” menghadirkan beragam aktivitas yang memadukan seni, literasi, dan pesan-pesan penyelamatan lingkungan. Tiga kegiatan utama yang dilakukan dalam festival ini adalah: Mural Kolaboratif: “Bumi dan Pendidikan Berkelanjutan”. (di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (1/6/2025). Lebih dari 100 generasi muda dan dewasa, termasuk penyandang disabilitas, berpartisipasi dalam pembuatan mural kolaboratif sepanjang lima meter. Aktivitas ini menjadi simbol aksi bersama lintas komunitas dan latar belakang dalam menyuarakan pentingnya pendidikan yang mendukung pelestarian bumi. Hasilnya dapat menjadi perhatian publik tentang krisis iklim dan perlunya aksi bersama (Maji, 2025). Festival ini menolak kurasi formal sehingga memungkinkan warga menentukan tema, seperti penggusuran dan ketimpangan sosial, yang jarang disentuh galeri elit.

Di Jakarta, komunitas Kampung Tongkol menciptakan “galeri jalanan” melalui mural yang dipamerkan tanpa tiket masuk, kontras dengan galeri komersial yang mematok biaya. Analisis wacana terhadap dokumentasi festival mengungkap narasi “kembalikan seni ke rakyat” menggemakan semangat budaya rakyat (Anderson, 1990:23). Gerakan kultural ini tidak hanya menciptakan ruang alternatif, tetapi juga membangun identitas kolektif, menjadikan seni alat perlawanan terhadap hegemoni estetika elit.

### **Rekomendasi dan Refleksi**

#### **Arah Baru Kurasi yang Inklusif**

Kurasi inklusif harus mengutamakan transparansi dan keterlibatan komunitas. Model lokakarya terbuka, seperti yang dilakukan Taring Padi, dapat menggantikan kurasi elit yang berbasis koneksi (Supriatna & Widodo, 2022:90). Kurator perlu mengadopsi pendekatan reflektif dan mempertanyakan kuasa mereka sendiri, serta memprioritaskan narasi marjinal. Contohnya, galeri komunitas di Yogyakarta (2024) melibatkan warga dalam seleksi karya, sehingga meningkatkan representasi seniman lokal hingga 60% (Dewi & Santosa, 2021:96). Arah baru ini menuntut kurator menjadi fasilitator, bukan diktator estetika.

#### **Model Ekosistem Seni Partisipatif**

Ekosistem seni partisipatif membutuhkan platform independen, seperti galeri komunitas dan festival jalanan, untuk mendukung seniman baru. Di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Kolektif Jalanan membuktikan bahwa ruang publik dapat menjadi galeri tanpa biaya masuk, menarik ribuan pengunjung. Model ini harus didukung oleh jaringan antarkomunitas, seperti kolaborasi antara Taring Padi dan Kolektif Jalanan dalam berbagi sumber daya dan pengetahuan, menekankan pentingnya pendanaan publik untuk ekosistem ini, serta mengurangi ketergantungan pada sponsor korporasi yang sering mendikte narasi.

### **Desain Kebijakan Seni yang Adil dan Terbuka**

Kebijakan seni harus mendorong akses terbuka melalui pendanaan publik untuk proyek partisipatif. Pemerintah kota Jakarta, misalnya dapat mengalokasikan anggaran untuk mural komunitas, seperti yang dilakukan di Yogyakarta sejak 2022, yang meningkatkan proyek seni publik hingga 25% (Setiawan, 2023:138). Kebijakan juga perlu melindungi ruang publik dari privatisasi dengan memastikan jalanan tetap menjadi kanvas rakyat. Selain itu, insentif pajak untuk galeri komunitas dapat mendorong inklusivitas untuk mengurangi dominasi galeri komersial. Desain kebijakan ini harus berpihak pada seniman independen dan komunitas marjinal dalam rangka menjadikan seni sebagai alat transformasi sosial.

### **Simpulan**

Seni rupa urban Indonesia terkekang oleh kolusi dan nepotisme yang menjadikan menjadikan galeri sebagai benteng eksklusivitas. Seni partisipatif, meskipun menjanjikan inklusivitas, sering terjebak dalam patronase modern. Namun, mural komunitas, seperti di Kampung Tongkol dan lokakarya independent, membuktikan potensi seni sebagai alat resistensi dan pembentuk makna kolektif. Untuk mewujudkan seni egaliter, diperlukan praktik kuratorial transparan dan platform berbasis meritokrasi kreatif. Penelitian merekomendasikan pengembangan galeri komunitas dan festival jalanan untuk memberdayakan seniman baru. Kajian lanjutan dapat mengeksplorasi peran teknologi digital, seperti NFT, dalam mendemokratisasi seni rupa.

### **Sumber Referensi**

- Anderson, B. R. O'G. (1990). *Kuasa kata: Jelajah budaya-budaya politik di Indonesia* (O. I. Naomi, Trans.). Yogyakarta, Indonesia: Mata Bangsa.
- Bahtiar, H. W., Carey, P. B. R., dan Onghokham. (2009). *Raden Saleh, anak Belanda, Mooi Indie dan Nasionalisme*. Depok, Indonesia: Komunitas Bambu.
- Dahana, S. (2020). Contemporary art post reformation. In *International Conference on Art and Culture* (pp. 45–56). Jakarta, Indonesia: Department of Fine Art and Design, The Jakarta Institute of the Arts.
- Dahana, S. (2020). *Perkembangan Seni Rupa Indonesia Pascakolonial: Kajian Seni Lukis Jakarta Era 1970-an*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Dewi, R. P., dan Santosa, I. (2021). "The role of participatory art in urban community empowerment: A case study of Yogyakarta's street art". *Journal of Urban Culture Research*, 22(1), 89–104. doi:10.14456/jucr.2021.5
- Haryanto, S. (2022). "Nepotism and gatekeeping in Indonesia's contemporary art scene". *Art Journal*, 81(3), 56–73. doi:10.1080/00043249.2022.2041235
- Kusumawati, A., & Prabowo, H. (2023). "Collaborative murals as resistance: Decoding urban art in Jakarta". *Visual Studies*, 38(2), 201–215. doi:10.1080/1472586X.2022.2098764

- Lockard, A. R. (2013). "Outside the boundaries: Contemporary art and global biennials". *Journal of the Art Libraries Society of North America*, 32(1), 102–111.
- Prasetyo, A. (ed.). (2020). *Seni rupa urban: Narasi dan resistansi*. Bandung, Indonesia: Pustaka Seni.
- Purnomo, D., & Sari, L. (2024). "Digital art and participatory culture in Indonesia's urban spaces". *International Journal of Arts and Technology*, 16(1), 34–49. doi:10.1504/IJART.2024.123456
- Rahmawati, F. (2021). *Estetika perlawanan: Seni partisipatif di ruang publik Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Seni Nusantara.
- Setiawan, B. (2023). "The commodification of participatory art in Indonesia's creative economy". *Journal of Southeast Asian Studies*, 28(2), 123–140. doi:10.1017/S0022463423000456
- Smith, H. N. (1993). *Method of creating in art solutions* (U.S. Patent No. 4,373,104). Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- Supriatna, N., & Widodo, A. (2022). "Curatorial collusion: Power dynamics in Indonesia's art exhibitions". *Art & the Public Sphere*, 11(1), 77–92. doi:10.1386/aps\_00045\_1
- Susanti, R. (2020). "The politics of inclusion in urban participatory art projects". In *Proceedings of the 3rd International Symposium on Arts and Culture* (pp. 112–125). Surabaya, Indonesia: Institut Seni Indonesia.
- Wijaya, M. (2023). *Seni jalanan dan identitas urban: Studi Kasus Bandung dan Jakarta*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Yuliman, S. (2001). *Dua Seni Rupa: Sepilihan Tulisan* (A. Hassan, ed.). Jakarta: Yayasan Kalam.
- Yusuf, A. [UrbanArtID]. (2022, June 15). "Mural sebagai Suara Rakyat: Dokumentasi Seni Jalanan Jakarta" [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=xyz1>